

## V. DESKRIPSI SWOT SETIAP KOMPONEN EVALUASI DIRI

### A. Integritas, Jatidiri, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

#### 1. Integritas

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berimplikasi pada perubahan pola pikir masyarakat yang lebih maju dan terbuka. Kesadaran masyarakat pada pendidikan pun semakin meningkat. Hal tersebut salah satunya ditandai dengan kemampuan masyarakat yang lebih selektif dalam memilih dan menentukan kebutuhannya dalam bidang pendidikan. Secara tidak langsung hal tersebut berdampak kepada setiap lembaga yang menyelenggarakan pendidikan untuk tampil dengan komitmen integritas yang tinggi. Integritas merupakan tanggungjawab moral yang perlu dijunjung sebagai sebuah komitmen terhadap dunia akademik.

Program Studi (Prodi) Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sebagai lembaga pencetak tenaga pendidik dalam bidang Bahasa dan Sastra Indonesia menyadari arti penting integritas lembaga sebagai landasan dalam menyelenggarakan aktivitas kependidikan. Landasan pembentukan integritas Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia didasarkan pada asas kejujuran, keterbukaan, dan kepedulian terhadap masyarakat sebagai *stakeholders* yang harus dilayani secara prima.

Dalam hal kejujuran, Prodi melakukan berbagai upaya untuk menjadikan kejujuran sebagai kultur penyelenggaraan setiap aktivitas, baik aktivitas akademik maupun sosial. Upaya penanaman nilai-nilai kejujuran dilakukan Prodi kepada seluruh civitas akademika dan diawasi secara ketat melalui sebuah mekanisme yang didukung oleh aturan pemberian sanksi bagi siapa saja yang melanggar nilai-nilai kejujuran. Masalah yang terkait dengan kejujuran mahasiswa misalnya, pada setiap awal perkuliahan dosen selalu menekankan arti penting kejujuran, pada saat ujian dilakukan pengawasan dengan ketat untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dilakukan mahasiswa. Prodi juga terus mewaspadai berbagai kemungkinan penipuan dan pemalsuan, termasuk plagiarisme yang dilakukan civitas akademika.

Dalam hal keterbukaan, Prodi selalu membuka diri untuk menerima masukan baik dari dosen, mahasiswa, dan pihak lainnya. Keterbukaan yang dilakukan Prodi meliputi segenap aspek manajerial, yaitu program kegiatan, anggaran, dan prestasi kinerja. Pelaporan segala hal yang berkaitan dengan Prodi dilakukan melalui berbagai rapat dan palaporan tertulis. Prodi juga secara rutin melakukan dialog dengan mahasiswa untuk menampung segala komentar, kritik, dan saran.

Dalam kaitannya dengan kepedulian masyarakat, Prodi selalu berupaya melakukan interaksi dengan masyarakat luas melalui berbagai kegiatan, seperti seminar, pelatihan, penelitian, dan pengabdian. Beberapa program kegiatan yang dirancang Prodi diorientasikan untuk melayani masyarakat, minimal satu kali dalam setahun Prodi melakukan seminar dengan mengundang guru-guru bahasa dan sastra Indonesia di berbagai jenjang pendidikan.

## **2. Jatidiri**

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia merupakan program yang bernaung di bawah Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Jurdiksatrasia), Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni. Perkembangan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan Jurdiksatrasia sebagai salah satu jurusan tertua di Universitas Pendidikan Indonesia.

Jurdiksatrasia FPBS UPI diresmikan bersamaan dengan berdirinya Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG), pada hari Rabu, 20 Oktober 1954, di Kampus Bumi Siliwangi, Bandung. Perseminan Jurdiksatrasia didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, tanggal 1 September 1954, No.38742/Kab dan disempurnakan dengan Surat Keputusan No. 40719/S, tanggal 6 Juli 1956, yang isinya menyatakan pendirian tiga buah PTPG di tiga daerah, sebagai pendidikan tinggi keguruan di Indonesia, yaitu PTPG Batu Sangkar (Sumatera Barat), PTPG Bandung (Jawa Barat), dan PTPG Malang (Jawa Timur).

Jurdiksatrasiia hingga kini (20 Oktober 2005) genap berusia 51 tahun dalam peranannya sebagai penghasil tenaga guru bahasa dan sastra Indonesia dan tenaga kependidikan lainnya. Selama itu pula telah terjadi berbagai perkembangan dan perubahan. Termasuk perubahan dan perkembangan dengan adanya perluasan mandat, yaitu dengan dibukanya Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia (Nonkependidikan) pada tahun 1998.

Dalam kurun waktu 51 tahun, dari PTPG hingga menjadi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), peranan Jurdiksatrasiia telah banyak mewarnai perkembangan pendidikan, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Dari garba kampus Bumi Siliwangi telah lahir ribuan Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang mengabdikan sebagai tenaga guru dalam berbagai jenjang pendidikan yang tersebar di seluruh penjuru pelosok tanah air. Jurdiksatrasiia FPBS UPI telah banyak menghasilkan para ahli di bidang pendidikan dan pengajaran yang melahirkan berbagai konsep dan pemikiran tentang pendidikan dan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan tingkat pendidikan tinggi.

Memasuki usianya yang ke-51 perkembangan dan perubahan Jurdiksatrasiia itu tampak dari kilasan perjalanan sejarah sebagai berikut.

#### **a. Periode PTPG (1954—1956)**

Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada saat didirikannya bernama Jurusan Bahasa dan Sastra, yang pertama kali diketuai oleh Drs. Subardi. Jurusan Bahasa dan Sastra dibagi menjadi dua seksi, yaitu (1) seksi bahasa dan sastra Indonesia, diketuai oleh Drs. Ukun Suryaman, dan (2) seksi bahasa dan sastra Sunda, diketuai Drs. Syahrul Syarif. Jumlah mahasiswa angkatan pertama sebanyak 21 orang, antara lain Ahmad Slamet, Muslim Nurdin, Basuki Soekamto. Jurusan Bahasa dan Sastra memiliki empat tugas pokok, yaitu:

- (1) menghasilkan tenaga guru yang merupakan manusia yang berpribadi penuh dan berpengetahuan cukup seimbang dengan tuntutan tugasnya;

- (2) melatih dan mempersiapkan manusia yang cakap bergaul, saling mengerti, mampu berorganisasi sebagai seorang yang bakal memimpin bangsanya;
- (3) berfungsi sebagai alat masyarakat untuk menjunjung tinggi perikemanusiaan, mencerdaskan kehidupan bangsa menuju kesejahteraan masyarakat lahir dan batin; dan
- (4) mengadakan penelitian kembali atas asas-asas didaktik metodik yang menjiwai pendidikan dan pengajaran pada umumnya.

#### **b. FKIP UNPAD (1961—1962)**

Pada tahap ini terjadi perubahan status lembaga dengan diintegrasikannya PTPG ke dalam organisasi kelembagaan UNPAD pada tahun 1958, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 1958 dan Putusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 25 November 1958. PTPG berubah status menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), bersamaan dengan semakin meningkatnya bidang akademik, personel, dan fisik material. Sejalan dengan perubahan kelembagaan itu, Jurdiksatrasi tetap eksis menjalankan tugas dan fungsinya secara baik.

#### **c. IKIP Bandung (Periode 1963—1964)**

Perubahan dan peningkatan yang sangat berarti bagi pengembangan kelembagaan terjadi pada saat FKIP berubah menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) berdasarkan SK Presiden No. 1, Tanggal 3 Januari 1963. Tugas dan fungsi peranan IKIP tersirat di dalam SK Presiden tersebut, yaitu sebagai berikut.

*Pertama*, mempersatukan FKIP dan IPG dalam satu Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang setingkat dengan universitas dalam lingkungan Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) dengan kerja sama yang sebaik-baiknya dengan universitas lain.

*Kedua*, membentuk satu dewan pembantu yang bertugas membantu Menteri PTIP dalam menetapkan organisasi, kurikulum, dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan tugas IKIP tersebut.

Begitu pula Jurdiksatrasia dalam perubahan dan peningkatan yang sangat berarti bagi pengembangan jurusannya, selalu mengikuti misi lembaga penanggungnya.

**d. IKIP Bandung (Periode 1964—1966)**

Dalam perkembangannya, IKIP mulai menata lembaga organisasi lebih profesional dalam meningkatkan layanan dan menjawab tantangan kebutuhan akan pendidikan di tanah air. Hasil penataan kelembagaan melahirkan struktur baru kelembagaan dengan terbentuknya lima fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan, Ilmu Sosial, Ilmu Eksakta, Ilmu Teknik, dan Ilmu Bahasa. Pada saat itu, IKIP Bandung memiliki 30 jurusan dan dibantu oleh beberapa biro di antaranya Biro Pembinaan Pendidikan Agama, Biro Pancasila, Biro Perpustakaan, dan Biro Praktik Keguruan. Jurdiksatrasia termasuk ke dalam 30 jurusan yang ada di IKIP Bandung.

**e. IKIP Bandung (Periode 1966—1971)**

Dalam suasana peralihan yang ditimbulkan oleh adanya kekacauan politik yang menimpa kehidupan berbangsa dan bernegara pada saat itu telah menimbulkan suasana yang tidak kondusif bagi kegiatan akademik seperti yang dialami oleh semua perguruan tinggi di tanah air. Termasuk para mahasiswa saat itu turun ke jalan berdemonstrasi menuntut perbaikan hidup yang dikenal dengan slogan Tritura. Dengan demikian suasana perkuliahan sedikit terganggu.

Hal yang penting dan menjadi catatan sejarah perkembangan IKIP Bandung antara lain adanya kepercayaan pemerintah dengan ditunjuknya IKIP Bandung sebagai IKIP pembina yang berkewajiban membina beberapa IKIP lain yang berada di Pulau Jawa. Sampai dengan tahun 1968, IKIP Bandung sebagai IKIP pembina mempunyai cabang di beberapa kota, yaitu (1) IKIP Bandung Cabang Banda Aceh, (2) IKIP Bandung Cabang Palembang, (3) IKIP Bandung Cabang Banjarmasin, dan (4) IKIP Bandung Cabang Palangkaraya. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pun memiliki kewajiban membina

jurusan-jurusan sejenis yang ada pada keempat IKIP tersebut sebagai bagian dari tugas lembaga.

#### **f. IKIP Bandung (periode 1971—1978)**

Sebagai lembaga pendidikan tinggi keguruan, IKIP berusaha menjalin kerja sama dengan berbagai pihak baik dengan antarperguruan tinggi negeri, swasta, maupun dengan lembaga lain yang terkait baik di dalam maupun di luar negeri. Pengembangan lain dilakukan dengan kegiatan penelitian atau workshop yang relevan dengan kepentingan IKIP Bandung.

Upaya peningkatan dan pengembangan IKIP Bandung secara konseptual dan terencana dimulai sejak tahun 1973 dengan disusunnya *master plan* IKIP Bandung. Penataan dan pembenahan dilakukan dengan oembangunan fisik, sarana prasarana kampus sebagai upaya meningkatkan kualitas proses dan kualitas hasil belajar mengajar.

Perbaikan kurikulum mulai diperkenalkan pada tahun 1977 dengan melakukan studi penyusunan kurikulum IKIP Bandung berdasarkan kemampuan. Usaha meningkatkan kemampuan tenaga pengajar, baik melalui penataran dalam maupun di luar negeri. Perbaikan dan penertiban administrasi umum mulai dilakukan. Sebelum tahun 1977, sistem administrasi umum dan administrasi akademik bersifat desentralisasi. Setelah tahun 1977, administrasi akademik dilakukan secara sentralisasi dengan sistem yang mapan. Untuk kepentingan administrasi akademik, didirikan Pusat Administrasi Akademik (PAA).

Pada 1974, konsorsium pendidikan memberikan kepercayaan kepada IKIP Bandung untuk menyelenggarakan program pascasarjana dengan terbentuknya Lembaga Pendidikan Posdoktoral (LPPD). Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia termasuk ke dalam program LPPD. Mahasiswa yang mengambil program LPPD dari Jurusan Bahasa Indonesia antara lain Drs. Suardi Sapani dan Drs. Djago Tarigan.

**g. IKIP Bandung (periode 1978—1987)**

Persoalan yang cukup pelik sehubungan dengan upaya pengembangan pada waktu itu, antara lain dengan adanya kebijakan penataan kehidupan kampus yang secara sungguh-sungguh dan konsepsional melalui normalisasi kehidupan kampus (NKK/BKK). Kebijakan tersebut mendapat tantangan dari mahasiswa dengan munculnya gerakan mahasiswa yang menjurus pada kegiatan politik praktis yang mengatasnamakan mahasiswa. Kegiatan tersebut meskipun tidak menunjukkan kekuatan yang besar, namun telah mengganggu ketertiban masyarakat ilmiah, khususnya dalam upaya menyiapkan calon guru dan ahli pendidikan dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional.

**h. IKIP Bandung Periode (1987—1994)**

Dalam periode ini dilaksanakan penataan struktur organisasi IKIP Bandung sesuai dengan PP No. 30 Tahun 1990. Semula IKIP Bandung memiliki dua biro, yaitu Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dan Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK), pada tahap ini dikembangkan lagi menjadi tiga biro dengan dibentuknya Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi (BAPSI), sesuai dengan SK Mendikbud Nomor 944/A.2.1.2/C/1994.

**i. IKIP Bandung Periode 1991—1994**

Prioritas pengembangan IKIP Bandung pada periode 1991—1994 mencakup 11 bidang pengembangan, yaitu kurikulum, tenaga edukatif dan administrasi, kemahasiswaan, fasilitas pendidikan, manajemen, kesejahteraan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, ketakwaan kepada Allah swt., alumni, KORPRI, Dharma Wanita, bidang kerja sama, dan pertemuan ilmiah.

**j. IKIP Bandung Periode 1995—1999**

Berbagai kegiatan pengembangan pada periode ini tercermin dari pelaksanaan pengembangan kebijakan yang terdiri atas meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt., meningkatkan mutu akademik, meningkatkan manajemen kelembagaan, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan

personel, meningkatkan upaya pembinaan kemahasiswaan dan alumni, meningkatkan budaya akademik, meningkatkan kepeloporan, meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, meningkatkan mutu kerja sama regional, nasional, dan internasional, meningkatkan pembinaan sarana dan prasarana, meningkatkan pembinaan organisasi di luar kedinasan.

Hal penting yang sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan IKIP Bandung pada periode 1994—1999 yaitu dikeluarkannya kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tinggi, antara lain konversi pendidikan tinggi keguruan di tanah air menjadi universitas. IKIP Bandung sebagai komponen perguruan tinggi yang termasuk dalam Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) harus mampu mengikuti tuntutan perubahan serta mengantisipasi kemungkinan pada masa yang akan datang. Dalam konteks ini IKIP Bandung diupayakan melakukan konversi menjadi universitas.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 124 tanggal 7 Oktober 1999, IKIP Bandung bersama dengan beberapa IKIP lain berubah status kelembagaan menjadi Universitas Pendidikan Indonesia. Kata “Pendidikan” yang melekat pada nama Universitas Pendidikan Indonesia merupakan komitmen lembaga untuk mengusung bidang pendidikan sebagai jati dirinya.

#### **k. Periode Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 1999-2004**

Perubahan IKIP Bandung menjadi Universitas Pendidikan Indonesia, sebagai satu-satunya IKIP di Indonesia yang menggunakan nama Universitas Pendidikan Indonesia, sementara IKIP lain menggunakan nama Universitas Negeri, bukan tanpa alasan yang kuat melainkan disemangati oleh jiwa dan komitmen yang kuat terhadap dunia kependidikan. Dengan demikian, Universitas Pendidikan Indonesia memunculkan ciri tersendiri yang secara filosofis berbeda dengan IKIP lainnya.

Universitas Pendidikan Indonesia memiliki visi untuk menjangkau jauh ke depan dalam upaya menempatkan posisi, peran, dan fungsinya dalam pembangunan pendidikan nasional dan dalam pembangunan SDM Indonesia secara menyeluruh. Hal itu kemudian menjadi visi universitas untuk menempatkan diri sebagai perguruan tinggi dengan komitmen kuat serta identitas

kependidikan yang kental, yang berarti bahwa pendidikan adalah watak dan identitas UPI.

Tekad dan komitmen yang kuat untuk tetap berada pada jalur pendidikan tampak dalam visi dan misi UPI untuk tetap tampil dengan bendera kependidikan sebagai andalannya untuk mengambil kepemimpinan dalam membangun bangsa, sesuai dengan semangat PTPG yang didirikan dalam upaya mengisi kemerdekaan dengan mencerdaskan masyarakat bangsa.

Pendidikan adalah keunggulan UPI serta diversifikasi keilmuan lain dalam upaya meningkatkan daya kontribusinya kepada masyarakat bangsa. Disadari bahwa diversifikasi menuntut adanya mekanisme untuk melaksanakan *cross fertilization, shares of resourcher* dalam proses pengembangan keilmuan dan dalam proses pembelajaran. Hal itu merupakan suatu keunggulan manajemen yang dapat mengokohkan UPI dalam pembangunan perguruan tinggi dan pembangunan pendidikan nasional serta dalam upaya mempersiapkan mutu SDM Indonesia yang tinggi.

Pada periode ini, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia telah banyak meningkatkan kualitas kiprahnya dalam rangka mengembangkan bahasa, sastra, dan pengajarannya. Berbagai kerjasama telah banyak dilakukan pada periode ini, terutama perluasan kerjasama dengan berbagai lembaga luar negeri di antaranya dengan *Australian Defense Force Language School (ADFLS)*. Kerjasama ini diaktualisasikan melalui pengajaran bahasa Indonesia bagi perwira angkatan laut Australia. Tantangan dan ancaman yang dihadapi Jurdiksatrasia dalam kaitannya dengan menjalankan tugas-tugasnya semakin berat, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM. Berbagai kebijakan peningkatan kualitas SDM pada periode ini mulai banyak dilakukan melalui studi lanjut, pencangkakan, pelatihan, seminar, dan rekuretnen tenaga baru.

### **1. Periode UPI BHMN**

Perubahan status UPI menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara melalui PP No. 6 tahun 2004 memberikan implikasi yang luar biasa besar kepada

setiap unit kerja untuk mengembangkan kemandirian dan keunggulan yang dilandasi asas profesionalisme. Menyikapi perubahan kultur menjadi PT BHMN, Jurdiksatrasia mulai menata pola manajemen yang lebih dinamis, terbuka, dan memiliki daya saing tinggi untuk mencapai kemandirian. Dalam rangka mencapai arah kemandirian itu, Jurdiksatrasia mulai mengembangkan program-program unggulan yang disokong oleh tenaga ahli di bidangnya. Program-program unggulan Jurdiksatrasia antara lain adalah Bahasa Indonesia Penutur Asing (BIPA), Diklat Kepenulisan dan Penyuntingan, Jurnalistik, Penerbitan (Pusat Studi Literasi), dan Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa berbasis ICT (Studio Multimedia Jurdiksatria).

Peluang yang dimiliki Jurdiksatrasia saat ini sangatlah luas karena aturan hukum yang memungkinkan setiap unit untuk berkiprah secara mandiri dan mengembangkan program-program unggulannya secara langsung. Akan tetapi, hal tersebut belum diikuti oleh rencana operasional di tingkat universitas sehingga peluang tersebut belum bisa dimanfaatkan dengan sempurna.

### **3. Visi**

Menumbuhkembangkan lulusan menjadi manusia berbudaya dan beradab, memiliki kemampuan dan wawasan untuk menjawab tantangan dan permasalahan kehidupan melalui pencetakan calon tenaga pengajar bahasa dan sastra Indonesia dan ahli bahasa/sastra yang berkelayakan.

### **4. Misi**

Sejalan dengan visi di atas, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia memiliki misi untuk:

- a. menyelenggarakan pendidikan bagi calon tenaga kependidikan dan nonkependidikan dan meningkatkan kualifikasinya dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia;
- b. melaksanakan penelitian dan pengkajian dalam rangka mengembangkan dan menerapkan disiplin ilmu bahasa dan sastra Indonesia;

- c. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan mutu dan tujuan-tujuan lain; dan
- d. menggalang kerja sama dengan berbagai pihak baik secara vertikal maupun horisontal.

## **5. Tujuan**

Tujuan penyelenggaraan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia adalah:

1. mendidik calon tenaga kependidikan dan nonkependidikan yang profesional dan berkelayakan dalam bidang studi bahasa dan sastra Indonesia;
2. menghasilkan berbagai penelitian yang berkenaan dengan kebahasaan, kesastraan, kependidikan, dan pengajarannya;
3. menghasilkan berbagai program inovatif dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia; dan
4. menyelenggarakan berbagai program kerja sama dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri.

## **6. Sasaran**

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan di atas maka sasaran Program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia adalah pembinaan dan pendidikan mahasiswa dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia, sehingga dihasilkan lulusan yang kompeten dalam pengajaran bidang tersebut. Khalayak sasaran pembinaan tersebut adalah alumni SMA atau sederajat. Di samping itu, masyarakat umum, lembaga pemerintah, dan lembaga swasta yang memiliki keterkaitan dengan visi, misi, dan tujuan juga merupakan sasaran Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.

**Tabel A.1**  
**Deskripsi SWOT Komponen Integritas, Jatidiri, Visi,**  
**Misi, Tujuan, dan Sasaran**

<b>Kekuatan (<i>Strengths</i>)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan dan aktivitas Prodi didasarkan pada asas kejujuran, keterbukaan, dan kepedulian terhadap masyarakat sehingga mencerminkan integritas lembaga yang tinggi.</li> <li>2. Visi, misi, tujuan, dan sasaran lembaga mencerminkan kekonsistenan dalam bidang kependidikan sebagai bidang utama yang dikembangkan sehingga arah pengembangan program menjadi lebih fokus.</li> <li>3. Jatidiri Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia sebagai bagian dari Universitas Pendidikan Indonesia merupakan kekuatan besar yang memberikan daya dukung positif terhadap penyelenggaraan aktivitas pendidikan Prodi karena UPI dengan tradisinya yang kuat memiliki mekanisme dan sarana untuk mempersiapkan calon guru, seperti adanya kerjasama Prodi dengan Fakultas Ilmu Pendidikan dalam menangani kelompok Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK) dan kerjasama UPT PPL dengan sekolah-sekolah dalam menyelenggarakan praktik pengalaman lapangan (PPL).</li> <li>4. Prodi bernaung di bawah UPI yang berstatus PT BHMN yang lebih otonom dalam mengambil kebijakan sehingga hal tersebut memberikan kekuatan bagi Prodi dalam mengembangkan berbagai program. Selain itu, status BHMN mewajibkan UPI untuk memiliki perangkat yang mendukung keterlaksanaan pelayanan berkualitas, seperti Majelis Wali amanat, Dewan Audit, dan Satuan Penjamin Mutu.</li> <li>5. Lokasi Prodi berada di kawasan sejuk yang berada di pusat kota sehingga tepat untuk menjadi wilayah pendidikan karena suasananya tenang dan mudah dijangkau.</li> </ol>
<b>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)</b>
<p>Sebagai akibat dari perluasan mandat, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia masih bernaung di bawah Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang</p>

menanungi dua program, program yang lainnya adalah Program Bahasa dan Sastra Indonesia. Kedua Prodi ini memanfaatkan sarana dan SDM yang sama, sehingga pengelolaannya relatif menjadi lebih sulit.

**Peluang (*Opportunities*)**

1. Perubahan status UPI menjadi PT BHMN memberikan peluang besar bagi Prodi untuk mengembangkan diri secara otonom dibandingkan Prodi di PT lain. Dalam hal ini, Prodi akan lebih leluasa melayani masyarakat dalam bidang ilmu yang ditekuninya melalui sertifikasi program tertentu.
2. Lahirnya UU dan Dosen memberi peluang pada peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Dengan demikian, minat calon mahasiswa untuk belajar di Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia semakin meningkat. Dengan demikian, Prodi akan mendapatkan input mahasiswa yang lebih baik karena terjaring dari seleksi masuk yang ketat.
3. Tujuan penyelenggaraan Prodi yang komperhensif memberikan peluang yang besar bagi lulusan untuk berkiprah di luar dunia kependidikan, misalnya dalam bidang industri penerbitan, *editing*, *broadcast*, dan jurnalistik.

**Ancaman (*Threats*)**

Adanya peluang dalam ketentuan hukum di Indonesia, yaitu tentang diizinkan nya perguruan tinggi untuk membuka Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan membuat daya saing dalam mendapatkan mahasiswa menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, Prodi harus terus berbenah dan meningkatkan kualitas agar selalu unggul secara kompetitif dan komparatif.